

ABSTRAK

Permasalahan kedisiplinan di lingkungan kerja pemerintah daerah Kabupaten Jepara terlihat masih cukup tinggi. Hal ini perlu adanya pembinaan yang konkrit terhadap aparatur penyelenggara Negara dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan suatu pemerintahan yang kuat, berwibawa dan bertanggung jawab. Salah satu unsur aparatur penyelenggara Negara adalah Pegawai Negeri Sipil. Dalam era otonomi saat ini pembinaan Pegawai Negeri Sipil juga telah diserahkan kepada daerah otonom sebagai wujud pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juga berdampak pada persoalan kewenangan di bidang Kepegawaian. Semua jenis kewenangan yang sudah disebutkan sama sekali tidak ditemukan secara tegas masalah kewenangan Kepegawaian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis dipergunakan untuk menganalisis Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik PNS. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas.

Hasil penelitian dapat disimpulkan : 1) Pelaksanaan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam mewujudkan kinerja aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara belum optimal khususnya kewajiban, larangan dan sanksi. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara adalah : Faktor internal yang terdiri dari kualitas sumberdaya manusia aparatur yang relatif kurang memadai, demikian juga dengan tingkat kesejahteraan seperti gaji yang diterima dirasakan masih kurang dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga Pegawai Negeri Sipil dan Faktor External yang meliputi faktor budaya dan lingkungan, mempengaruhi disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di mana sangat nampak pada rasa kekeluargaan/kebersamaan masyarakat Jepara khususnya pada kegiatan-kegiatan adat. 3) Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai negeri sipil yaitu dengan dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pegawai negeri sipil atas pemahaman kewajiban dan larangan.

Kata kunci : Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Kinerja

ABSTRAC

Problems of discipline in the work environment Jepara regency government looks still quite high. This need for concrete guidance to the organizers of the State apparatus as part of efforts to create a strong government, authoritative and responsible. One element of the organizers of the State apparatus is a Civil Servant. In the autonomy era is now coaching the Civil Service has also been handed over to autonomous regions as a form penberian authority to regulate and manage the household in the principle of broad autonomy, real and responsible. The enactment of Law No. 32 of 2004 also had an impact on the issue of authority in the field of Human Resources. All kinds of authority that has been mentioned at all not clearly found Staffing authority issues. The method used in this research using empirical juridical approach. Judicial approach used to analyze Law No. 5 of 2014 concerning the State Civil Reform on Development Corps and the Code of Ethics of civil servants. Analysis of the data in this study conducted qualitatively, from the data obtained is then systematically compiled and analyzed qualitatively to achieve clarity on the issues discussed.

The results of this study concluded: 1) Implementation of the Civil Service Disciplinary Code in realizing the performance of local government apparatus Jepara regency is not optimal, especially obligations, prohibitions and sanctions. 2) The factors that lead to violations of discipline Civil Servants in Local Government Jepara regency are: Internal factors comprising the quality of human resources personnel are relatively inadequate, as well as the level of welfare as their salary felt still lacking and insufficient to meet the needs of families and the Civil Servants External factors that include cultural and environmental factors, affecting the work discipline Civil Servants where very apparent on sense of family / community togetherness Jepara, especially on the activities of customs. 3) Activities undertaken to improve the discipline of civil servants is to be developed, the monitoring and evaluation of the performance of civil servants on understanding the obligations and prohibitions.

Keywords: Civil Servant Discipline, Performance